BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu agar dapat berkontribusi pada masyarakat. Pemerataan mutu layanan pendidikan menjadi faktor penentu kemajuan bangsa (Nurhayati, 2018), yang juga menjadi core utama implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dalam memperkuat akses pendidikan inklusif dan wajib belajar 13 tahun. Secara yuridis, komitmen ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, serta Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Regulasi terbaru ini menjadi instrumen krusial yang mengamanatkan sinergi lintas sektor dalam mengidentifikasi dan mengembalikan anak ke jalur pendidikan.

Secara yuridis formal, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai anak usia 6 sampai 18 tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Batasan ini memberikan arah kebijakan yang fokus pada mitigasi risiko hilangnya potensi generasi bangsa. Fenomena ATS di Indonesia sendiri dipicu oleh kompleksitas

multidimensional. Rumberger (2011) mengategorikan akar masalah ini ke dalam faktor individual (nilai dan perilaku) dan faktor institusional (keluarga, komunitas, dan lingkungan struktural). Sementara Bappenas (2020) mengidentifikasi faktor sistemik seperti belum meratanya distribusi layanan, rendahnya relevansi pendidikan, hambatan struktural kemiskinan, serta nilai sosial budaya masyarakat. Berbagai hambatan tersebut tecermin dari data Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Kemendikdasmen per 24 April 2026, di mana total ATS nasional mencapai 3.956.772 anak, yang didominasi oleh kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 1.907.376 anak, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebesar 1.064.083 anak, dan Putus Sekolah / *Drop Out* (DO) sebanyak 985.313 anak.

Tantangan nasional ini berimplikasi langsung pada lingkup regional Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data Verval ATS Kemendikdasmen per 24 April 2026, angka kumulatif ATS di Sulawesi Barat mencapai 35.714 anak. Sebaran data tersebut dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Anak Tidak Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jumlah BPB	Jumlah DO	Jumlah LTM	Total
1	Kab. Mamuju	3.676	1.678	2.217	7.571
2	Kab. Pasangkayu	4.645	1.181	1.353	7.179
3	Kab. Polewali Mandar	4.842	2.955	3.390	11.187
4	Kab. Mamasa	2.334	946	1.126	4.406
5	Kab. Majene	947	958	1.196	3.101
6	Kab. Mamuju Tengah	1.590	495	185	2.270
Sulawesi Barat		**18.034**	**8.213**	**9.467**	**35.714**

Sumber: Data Verval ATS Kemendikdasmen, 25 April 2026 (diolah peneliti)

Tabel di atas memperlihatkan disparitas akses pendidikan yang nyata, di mana Kabupaten Polewali Mandar mencatatkan angka ATS tertinggi yaitu 11.187 anak. Secara kewilayahan, kelompok BPB menjadi penyumbang dominan tingkat provinsi (18.034 anak), disusul LTM (9.467 anak) dan DO (8.213 anak). Menanggapi urgensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU) sebagai wujud komitmen integrasi pembangunan lintas sektor yang mencakup 72 desa percontohan. Program PASTIPADU dirancang sebagai *umbrella policy* (kebijakan payung) yang menginterintegrasikan berbagai isu krusial daerah, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penanganan anak tidak sekolah.

Secara teoretis, langkah ini merepresentasikan model *Collaborative Governance* yang menuntut keterlibatan lintas aktor formal demi menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Ansell dan Gash, 2007). Dalam kerangka kebijakan PASTIPADU tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat memegang peranan strategis pada pilar penanganan ATS melalui penyusunan sub-program operasional bertajuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) "Pappasikolai Anakta". Program ini diturunkan secara khusus sebagai instrumen teknis berbasis komunitas lokal untuk memutus mata rantai kemiskinan dan intergenerasi kerentanan di tingkat desa, sekaligus untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Tim Penanganan ATS Provinsi Sulawesi Barat menerapkan tahapan sistematis, mulai dari analisis *dashboard data*,

rapat koordinasi kewilayahan, bimbingan teknis, hingga rekonfirmasi faktual secara *door-to-door* oleh petugas lapangan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor—termasuk staf dinas, operator data, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), serta kader Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk klaster kewenangan provinsi (jenjang SMA/SMK/Sederajat), ditentukan *base data* awal sebanyak 655 anak sasaran di 59 desa lokus PASTIPADU yang berada pada rentang usia 16-22 tahun dengan kategori LTM dan DO. Setelah proses verifikasi faktual selama dua minggu, ditemukan rekapitulasi data riil sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Rekonfirmasi ATS Menurut Kabupaten

Kabupaten	Bersekolah	BPB	DO	LTM	Total
Mamuju	14	16	77	54	161
Majene	4	1	43	84	132
Polewali Mandar	3	4	90	75	172
Mamasa	11	0	32	24	67
Pasangkayu	1	3	38	45	87
Mamuju Tengah	3	0	18	15	36
Total	**36**	**24**	**298**	**297**	**655**

Sumber: Data Olahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, 2026

Hasil rekonfirmasi lapangan pada Tabel 2 memvalidasi bahwa klaster kewenangan provinsi didominasi oleh kategori DO (298 anak) dan LTM (297 anak). Penargetan ini sejalan dengan studi OECD (2025) yang menyatakan fase remaja akhir (*mid-to-late adolescence*) merupakan titik kritis paling rawan mengalami disonansi pendidikan. Di sisi lain, ditemukannya anomali

berupa anak yang ternyata sudah bersekolah (36 anak) dan BPB (24 anak) membuktikan krusialnya verifikasi faktual lokal untuk mengoreksi *target error* pangkalan data makro.

Secara spasial, Kabupaten Polewali Mandar kembali menjadi wilayah dengan konsentrasi DO dan LTM tertinggi (172 anak). Dari 12 desa lokus program PASTIPADU di Polewali Mandar, separuhnya (6 desa) terpusat di Kecamatan Campalagian. Realitas ini menjadikan Kecamatan Campalagian sebagai episentrum kerentanan putus sekolah di tingkat kabupaten. Kondisi kuantitatif hasil rekonfirmasi di Kecamatan Campalagian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Rekonfirmasi ATS di Kecamatan Campalagian

Desa	Total Anak Direkonfirmasi	LTM	DO	Ingin Kembali Sekolah
Bonde	16 Anak	4	12	10
Katumbangan	30 Anak	17	13	16
Laliko	21 Anak	6	15	11
Lampoko	7 Anak	4	3	2
Parappe	7 Anak	4	3	0
Sumarrang	14 Anak	13	1	7
Total	**95 Anak**	**48**	**47**	**46**

Sumber: Data Olahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, 2026

Berdasarkan Tabel 3, Desa Katumbangan menjadi wilayah dengan densitas kasus tertinggi di Kecamatan Campalagian dengan total 30 anak (17 LTM dan 13 DO). Menariknya, dari aspek motivasi, Desa Katumbangan juga memiliki angka keinginan kembali bersekolah tertinggi yaitu 16 anak. Hal ini memberikan justifikasi empiris yang kuat bahwa Desa Katumbangan merupakan lokus yang paling representatif untuk diteliti.

Urgensi penanganan di Desa Katumbangan tidak hanya bersandar pada data kuantitatif, melainkan berkelindan dengan hambatan struktural sosio-ekonomi penduduk. Keterbatasan finansial memaksa anak-anak membantu ekonomi keluarga sehingga mengorbankan waktu studi mereka. Data BPS (Susenas, 2026) mencatat jumlah penduduk miskin di Polewali Mandar pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi di Sulawesi Barat, yakni mencapai 63,29 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan ini berbanding lurus dengan rendahnya capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Polewali Mandar tahun 2025 yang hanya menyentuh 7,84 tahun dan merupakan yang terendah di provinsi ini dan berada di bawah standar wajib belajar dasar 9 tahun.

Selain faktor ekonomi, disorientasi persepsi keluarga terhadap urgensi pendidikan menengah atas serta kesenjangan validitas data makro versus mikro menjadi tantangan psikosocial dan birokrasi yang kompleks. Guna meretas hambatan kultural dan finansial tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi secara sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menginisiasi sebuah terobosan kebijakan yang membumi.

Program inovasi lokal bertajuk "Pappasikolai Anakta" ini dicetuskan secara resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Penanganan ATS Regional, dan mulai diimplementasikan secara intensif sejak awal tahun 2026. Langkah ini diawali dengan pembentukan tim teknis lintas sektor dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi para petugas rekonfirmasi di lapangan.

Hingga saat ini, implementasi program telah menunjukkan hasil awal yang signifikan di tingkat tapak, khususnya melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verval ATS) secara *by name by address* yang berhasil menyisir dan merekonfirmasi status riil anak langsung ke rumah-rumah warga. Melalui integrasi tata kelola data berbasis *street-level bureaucracy* dan pendekatan persuasif bersendi kearifan lokal ini, program berhasil memetakan faktor determinan putus sekolah secara akurat, mereduksi resistensi sosial orang tua, serta mulai menyalurkan kembali anak-anak pasca-rekonfirmasi ke satuan pendidikan formal maupun non-formal (PKBM). Puncak komitmen ini ditandai dengan seremoni pengembalian anak bersekolah secara massal pada momentum Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026. Namun demikian, dinamika kepatuhan birokrasi, daya tanggap lapangan, serta efektivitas distribusi manfaat di tingkat perdesaan masih memerlukan kajian evaluatif yang mendalam.

Berlandaskan pada kompleksitas fenomena empiris serta urgensi teoretis di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian komprehensif yang dituangkan ke dalam tesis berjudul: **"Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah Bertajuk 'Pappasikolai Anakta' di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah bertajuk *Pappasikolai Anakta* di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah bertajuk *Pappasikolai Anakta* di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah bertajuk *Pappasikolai Anakta* di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah bertajuk *Pappasikolai Anakta* di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) terkait penanganan anak tidak sekolah (ATS) di tingkat daerah.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu strategis mengenai pendidikan inklusif, penanggulangan anak putus sekolah, dan inovasi pelayanan dasar di wilayah perdesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi kebijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait dalam merumuskan program intervensi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data.
b. Menjadi panduan praktis dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di tingkat tapak guna mengidentifikasi, memotivasi, dan menangani anak tidak sekolah di wilayah Kecamatan Campalagian.
c. Memberikan wawasan mengenai pentingnya pendekatan partisipatif dan psikososial dalam menangani hambatan kultural maupun ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat rentan.